



KALOSARA DAN TEOLOGI PERDAMAIAN: PILAR KULTURAL-SPIRITUAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Oleh:

^{*1} Richard Gabriel Haug, ^{*2} Amirrudin Zalukhu

^{*12} Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

Email : ^{*1}jhoe4567@gmail.com, ^{*2}rudizalukhu408@gmail.com

Informasi Artikel

Diserahkan :

15 April 2025

Diterima :

24 September 2025

Dipublikasi :

25 September 2025

Kata kunci : Kalosara, teologi perdamaian, persatuan, rekonsiliasi, Indonesia Emas 2045.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Kalosara, sebagai simbol adat masyarakat Tolaki, memiliki nilai-nilai fundamental seperti musyawarah, keadilan, dan keseimbangan yang berperan dalam menjaga harmoni sosial. Nilai-nilai ini selaras dengan konsep teologi perdamaian yang menekankan rekonsiliasi, kasih, dan keadilan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Kalosara dan teologi perdamaian dalam memperkuat kesatuan bangsa guna menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai Kalosara dan teologi perdamaian dapat menjadi strategi efektif dalam membangun harmoni sosial. Implementasi prinsip musyawarah mufakat, toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman dapat mencegah konflik dan menciptakan tatanan sosial yang adil. Dengan demikian, pemanfaatan kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa berpotensi memperkuat persatuan dan membangun masa depan Indonesia yang damai dan sejahtera.

ABSTRACT

Indonesia, as a multicultural nation, faces significant challenges in maintaining unity and cohesion amid its diversity. Kalosara, as a traditional symbol of the Tolaki people, embodies fundamental values such as deliberation, justice, and balance, which play an essential role in preserving social harmony. These values resonate with the concept of peace theology, which emphasizes reconciliation, love, and justice in fostering an inclusive and harmonious society. This study aims to analyze the integration of Kalosara and peace theology in strengthening national unity to address the challenges on the path toward Indonesia Emas 2045. Through a qualitative approach using literature analysis, this research demonstrates that integrating

Keyword : Kalosara, peace theology, unity, reconciliation, Indonesia Emas 2045.

the values of Kalosara and peace theology can serve as an effective strategy for building social harmony. The implementation of deliberative consensus, tolerance, and respect for diversity can prevent conflict and establish a just social order. Thus, the integration of local wisdom and spiritual values in national life has the potential to reinforce unity and shape a peaceful and prosperous future for Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa multikultural yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman ini merupakan aset besar yang memperkaya identitas bangsa, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Sejak kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun identitas nasional yang inklusif tanpa meniadakan keunikan budaya lokal. Namun, dinamika sosial, politik, dan ekonomi sering kali memunculkan ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, tantangan tersebut menuntut strategi yang lebih mendalam untuk membangun harmoni di tengah keberagaman.

Selain budaya, keberagaman Indonesia juga mencakup agama dan sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat. Jika tidak dikelola dengan bijak, perbedaan ini berpotensi memicu konflik. Sejarah mencatat sejumlah konflik berbasis etnis maupun agama yang mengancam persatuan bangsa, yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, perbedaan keyakinan, hingga lemahnya pemahaman lintas budaya. Di era globalisasi, tantangan semakin kompleks karena arus informasi yang cepat sering memperuncing perbedaan. Oleh sebab itu, pendekatan menjaga persatuan tidak cukup hanya legal-formal, melainkan harus menyentuh dimensi budaya dan spiritual yang hidup dalam masyarakat.¹

Salah satu bentuk kearifan lokal yang relevan adalah Kalosara dari masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Kalosara bukan hanya simbol adat, melainkan sistem nilai yang mengatur relasi sosial dan menekankan musyawarah, keadilan, dan penghormatan sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan sosial. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip teologi perdamaian yang menekankan kasih, rekonsiliasi, dan keadilan. Teologi perdamaian memandang perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan proses aktif yang berkelanjutan dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, integrasi Kalosara dan teologi perdamaian dapat dipandang sebagai strategi penting dalam membangun masyarakat inklusif dan harmonis menuju Indonesia Emas 2045.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan kontribusi kearifan lokal terhadap teologi perdamaian. Studi tentang Dalihan Na Tolu di Batak Toba menunjukkan bagaimana penghormatan kepada keluarga, perlakuan lembut terhadap perempuan, dan relasi kekerabatan

¹ Amirrudin Zalukhu, "Strategi Integratif Teologi Sosial, Perdamaian, Dan Kearifan Lokal Dalam Membangun Harmoni Sosial Di Indonesia," *CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2025): 178, <https://e-journal.anugrah.ac.id/index.php/JCH/article/view/259>.

dapat menjadi instrumen penyelesaian konflik domestik.² Pela Gandong di Maluku mengandung nilai persaudaraan dan kesetiaan yang berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi pascakonflik.³ Sementara itu, penelitian Rezky Juniarsih Nur, Dadan Wildan, dan Siti Komariah tentang falsafah *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'* dalam budaya Bugis-Makassar menekankan pentingnya penghormatan, kesetaraan, dan pengingat moral dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis.⁴ Hasil-hasil penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal memiliki kontribusi signifikan dalam menopang nilai perdamaian dan harmoni sosial.

Artikel ini memiliki kebaruan dengan menempatkan Kalosara sebagai pilar kultural yang dipadukan dengan teologi perdamaian sebagai pilar spiritual, sehingga keduanya dapat membentuk fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Keunggulan tulisan ini terletak pada sifatnya yang integratif, yakni mempertemukan kearifan lokal dengan dimensi teologis dalam satu kerangka analisis. Perspektif ini juga kontekstual karena berangkat dari budaya Tolaki yang jarang dikaji dalam diskursus perdamaian nasional. Lebih jauh, pendekatan ini aplikatif karena menawarkan kerangka implementatif, mulai dari pendidikan, mediasi sosial, hingga pembangunan bangsa berbasis nilai perdamaian. Dengan demikian, integrasi Kalosara dan teologi perdamaian berpotensi menjadi strategi kultural-spiritual yang mampu memperkuat kesatuan, membangun ketahanan sosial, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana integrasi nilai-nilai yang terkandung dalam Kalosara dan teologi perdamaian dapat dijadikan sebagai landasan dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa menuju Indonesia 2045. Hal ini penting dikaji untuk menemukan paradigma yang relevan dalam memperkuat persaudaraan, toleransi, dan harmoni sosial demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka untuk menganalisis nilai-nilai Kalosara dalam membangun kesatuan dan perdamaian di masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, serta proses sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka dan statistik. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dari jurnal, buku, serta dokumen yang membahas Kalosara dan teologi perdamaian. Melalui

² Amirrudin Zalukhu, "The Implementation of Dalihan Na Tolu Values as Christian Education in Approaching Domestic Violence Conflict Resolution," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 14, no. 2 (June 30, 2025): 295–309, <https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/3005>.

³ Althien John Pesurnay, "MUATAN NILAI DALAM TRADISI PELA GANDONG DI MALUKU TENGAH," *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 3, no. 1 (December 3, 2021): 17–28, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JABI/article/view/35003>.

⁴ Rezky Juniarsih Nur, Dadan Wildan, and Siti Komariah, "Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3s (Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge') Sebagai Simbol Kearifan Lokal," *Mimesis* 4, no. 2 (2023): 166–179.

pendekatan ini, penelitian berupaya memahami makna, peran, serta integrasi Kalosara dalam menjaga persatuan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Untuk meningkatkan validitas dan relevansi penelitian, pendekatan ini dikombinasikan dengan analisis data empiris, seperti wawancara dengan masyarakat Tolaki dan observasi praktik Kalosara dalam kehidupan sosial. Selain itu, triangulasi data diperlukan dengan membandingkan berbagai sumber guna mengurangi bias dalam pemilihan literatur. Dengan penguatan metodologi ini, penelitian dapat memberikan kontribusi lebih luas, baik dalam kajian akademik mengenai kearifan lokal maupun dalam implementasi nilai-nilai budaya dalam membangun harmoni sosial dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalosara sebagai Simbol Perdamaian dan Kesatuan Masyarakat Tolaki

Pengertian dan Makna Kalosara dalam Adat Tolaki

Kalosara merupakan tradisi adat khas masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara yang berperan penting dalam struktur sosial, hukum, dan budaya lokal. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga bagian integral dari sistem hukum adat yang mengatur kehidupan sosial serta menjadi pedoman moral masyarakat. Berdasarkan catatan sejarah, Kalosara diperkenalkan oleh Putri Wekoila dari Kerajaan Konawe pada abad ke-11 M. Kehadirannya diyakini sebagai titisan Sangia I Wano Sangia, penguasa dunia atas dalam kepercayaan Tolaki. Pada awalnya, tujuan utama Kalosara adalah menyatukan tiga kerajaan besar, yaitu Wawolesea, Besulutu, dan Pandangguni.⁵ Sejak masa kerajaan, simbol ini digunakan dalam penyelesaian konflik, musyawarah adat, dan penguatan solidaritas sosial. Masyarakat Tolaki kemudian memandang Kalosara sebagai warisan nilai dan norma yang menekankan pentingnya keadilan, persatuan, serta penghormatan terhadap sesama.⁶

Secara etimologis, kata *Kalosara* berasal dari “*kalo*” yang berarti lingkaran dan “*sara*” yang berarti aturan atau hukum adat. Filosofi lingkaran mencerminkan kesatuan sosial yang tidak terputus, keterhubungan antarindividu, serta kesinambungan nilai adat dalam kehidupan komunitas. Bentuk fisik Kalosara berupa lingkaran rotan yang diletakkan di atas talem anyaman khas Tolaki (Gambar 1), melambangkan keharmonisan dan komitmen kolektif dalam menjaga tatanan sosial, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun antarsuku.⁷ Warna putih melambangkan hati yang bersih, kejujuran, serta ketulusan dalam berinteraksi sosial, sekaligus mencerminkan transparansi dan integritas dalam pengambilan keputusan.⁸ Dalam konteks

⁵ Amisbah Ramly et al., “Tradisi Kalosara Dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter Pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 7749.

⁶ Jamil et al., “Tradisi Kalo Sara Pada Masyarakat Tolaki Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara,” *JPeB (Jurnal Penelitian Budaya)* 8 (2023): 15–26.

⁷ Awal Awal, Andi Aderus, and Indo Santalia, “Moderasi Beragama Pada Masyarakat Konawe Selatan (Studi Atas Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Kalosara Masyarakat Konawe Selatan),” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (October 31, 2023): 195–215, <https://jurnal.uem-si.ac.id/index.php/el-fata/article/view/64>.

⁸ Ramly et al., “Tradisi Kalosara Dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter Pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka.”

sosial, keberadaan kain putih mengajarkan pentingnya membangun komunikasi yang berlandaskan saling percaya dan menghargai.⁹



Gambar 1. Peralatan dalam adat kalosara berupa lingkaran rotan, daun sirih, buah pinang, dan talem anyaman.

Sumber: <https://sultratop.com/makna-kalosara-dalam-masyarakat-tolaki-mengapa-pakai-rotan/>

Fungsi utama Kalosara terwujud dalam musyawarah adat atau mepokoaso, di mana simbol ini diletakkan di tengah lingkaran sebagai tanda netralitas dan keadilan. Kehadirannya menegaskan bahwa setiap musyawarah harus dilakukan dengan semangat mufakat dan rekonsiliasi. Dalam proses ini, tetua adat bertindak sebagai mediator untuk memastikan tercapainya kesepakatan yang adil. Nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi adalah *mosalino* (kesetiaan terhadap norma adat), *modito* (kesopanan dalam berbicara dan bertindak), serta *medulu* (menjaga persaudaraan dalam perbedaan). Nilai-nilai ini berfungsi mencegah rusaknya relasi sosial sekaligus membentuk karakter kepemimpinan adat.¹⁰ Pemimpin dalam budaya Tolaki tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga kebijaksanaan serta pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Kalosara. Lebih jauh, Kalosara juga memiliki dimensi spiritual, karena diyakini sebagai penghubung antara manusia dengan leluhur. Dalam berbagai ritual adat, ia digunakan sebagai media permohonan perlindungan dan berkah, memperlihatkan eratnya hubungan antara adat dan spiritualitas.

Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat Tolaki meyakini bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa merusak tatanan sosial yang telah terjalin. *Kalosara* juga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai kepemimpinan. Seorang pemimpin adat Tolaki tidak hanya dipilih berdasarkan garis keturunan, tetapi juga atas dasar kebijaksanaan dan pemahaman terhadap nilai-nilai *Kalosara*. Pemimpin ideal adalah sosok yang mampu menengahi konflik, memahami kebutuhan masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil membawa

⁹ | Ketut Suardika & Sulsalman Moita Munir, "Makna Simbolik Kalosara Dalam Kehidupan Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe," *Jurnal Fokus Penelitian Budaya* 4, no. 1 (2019): 12–22.

¹⁰ Eko Putra and Syarifuddin Tundreng, "Makna Filosofi Ungkapan Peribahasa Masyarakat Tolaki Mekongga Di Kabupaten Kolaka," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (August 2024): 381–389.

keadilan dan kesejahteraan.¹¹ Di samping aspek sosial-politik, *Kalosara* memiliki dimensi spiritual yang kuat. Ia diyakini sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Dalam berbagai upacara adat, *Kalosara* digunakan sebagai media permohonan kepada leluhur untuk perlindungan dan berkah. Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara nilai-nilai adat dan spiritualitas dalam masyarakat Tolaki.¹²

Melalui pendidikan, sosialisasi budaya, serta dukungan pemerintah dan komunitas adat, *Kalosara* terus dijaga kelestariannya. Lebih dari sekadar simbol tradisi, *Kalosara* adalah sistem nilai yang mengajarkan keadilan, keharmonisan, dan penghormatan antarmanusia. Bagi masyarakat Tolaki, *Kalosara* bukan hanya identitas budaya yang memperkuat solidaritas internal, tetapi juga kontribusi nyata bagi persatuan bangsa dalam keragaman. Dengan demikian, *Kalosara* tetap hidup sebagai warisan budaya yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna filosofisnya.¹³ *Kalosara* bukan hanya simbol adat, tetapi sebuah sistem nilai yang mencerminkan keadilan, keharmonisan, dan penghormatan antarmanusia. *Kalosara* menjadi identitas budaya yang tidak hanya menguatkan masyarakat Tolaki, tetapi juga menyumbang pada persatuan bangsa dalam keragaman.¹⁴

Nilai-nilai Utama dalam Kalosara

Kalosara merupakan simbol adat yang memiliki peran fundamental dalam membentuk tatanan sosial masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Lebih dari sekadar identitas budaya, *Kalosara* mengandung makna filosofis yang mendalam serta berfungsi sebagai pedoman etika yang mengatur kehidupan bersama.¹⁵ Simbol ini menekankan keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan sosial, baik di tingkat individu, keluarga, maupun komunitas. Nilai utama yang dijunjung tinggi adalah musyawarah, yang diwujudkan dalam forum kolektif sebagai sarana penyelesaian persoalan. Musyawarah dalam adat Tolaki tidak hanya bersifat diskursif, tetapi juga menekankan kebersamaan, partisipasi, dan semangat demokratis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Keputusan yang dihasilkan harus adil dan berpihak pada kepentingan bersama, bukan hanya pada kelompok tertentu.¹⁶ Prinsip ini memperlihatkan bahwa masyarakat Tolaki sejak lama mengutamakan dialog sebagai cara mengelola konflik. Selain itu, keadilan menjadi prinsip mendasar dalam *Kalosara*, yang dipahami secara komprehensif mencakup distribusi hak, pemenuhan kewajiban,

¹¹ Nur Alim, Badarwan Badarwan, and Syahrul Syahrul, "Edukasi Kepemimpinan Berbasis Tradisi Lokal Pada Masyarakat Tolaki Di Kabupaten Konawe," *Shautut Tarbiyah* 26, no. 1 (May 2020): 32–49.

¹² Ramly et al., "Tradisi *Kalosara* Dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter Pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka."

¹³ Amirrudin Zalukhu, "Kalosara Dan Pendidikan Kristen Sebagai Fondasi Kepemimpinan Transformasional Untuk Perdamaian Dan Harmoni Sosial Di Masyarakat Tolaki," *MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (March 2025): 1–19.

¹⁴ Anwar Hafid et al., *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL*, ed. Nur Berlian VA and Voni Damayanti (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

¹⁵ Putra and Tundreng, "Makna Filosofi Ungkapan Peribahasa Masyarakat Tolaki Mekongga Di Kabupaten Kolaka."

¹⁶ Aan Andryan Saputra, Djohar Arifin, and Basoddin, "ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN MELALUI HUKUM ADAT TOLAKI (Suatu Studi Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)," *Sultra Law Review* 02 (2020): 969–986.

hingga pemerataan pemanfaatan sumber daya. Jika prinsip tersebut dilanggar, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme korektif dengan orientasi restoratif, menekankan pemulihan relasi sosial dan keseimbangan komunitas daripada sekadar penghukuman. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tolaki telah lama memiliki sistem keadilan yang bersifat restoratif dan menempatkan relasi sosial sebagai inti dari pemulihan.

Nilai-nilai lain yang terkandung dalam Kalosara adalah kesejahteraan, keharmonisan, persatuan, serta penghormatan terhadap hukum adat. Kesejahteraan sosial dimaknai bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari suasana kehidupan yang tenteram, damai, dan saling menopang melalui praktik gotong royong dalam aktivitas pertanian maupun upacara adat, yang memperlihatkan kuatnya solidaritas sosial.¹⁷ Persatuan dan kesatuan dalam Kalosara menegaskan bahwa setiap individu adalah bagian dari komunitas yang lebih besar dengan tanggung jawab kolektif menjaga harmoni sosial. Nilai ini menjadi penting dalam menghadapi dinamika modernisasi dan perubahan generasi. Terakhir, penghormatan terhadap hukum adat berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial. Sanksi yang diberikan tidak dimaksudkan untuk menghukum secara represif, melainkan untuk mengembalikan tatanan yang harmonis.¹⁸ Dengan demikian, melalui nilai musyawarah, keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, persatuan, dan penghormatan hukum adat, Kalosara tidak hanya menjadi model etika sosial masyarakat Tolaki, tetapi juga relevan sebagai pedoman membangun masyarakat multikultural Indonesia yang inklusif dan harmonis, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Peran Kalosara dalam Menyelesaikan Konflik dan Memperkuat Persatuan Masyarakat Tolaki

Kalosara memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik di masyarakat Tolaki, tidak hanya sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, Kalosara berfungsi sebagai media rekonsiliasi melalui proses *mosara* atau musyawarah adat yang melibatkan pihak-pihak bersengketa serta tokoh masyarakat, sehingga setiap suara didengar dan keputusan yang diambil adil serta tidak memihak.¹⁹ Nilai keadilan dalam Kalosara bersifat restoratif, lebih menekankan pemulihan keseimbangan sosial daripada penghukuman, sekaligus mengembalikan hak pihak yang dirugikan. Selain itu, Kalosara menekankan kebersamaan dan gotong royong, karena penyelesaian konflik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada seluruh komunitas, sehingga masyarakat dilibatkan secara aktif demi terwujudnya tanggung jawab kolektif menjaga perdamaian. Dalam konteks modernisasi, Kalosara berfungsi sebagai jembatan antargenerasi, menjaga relevansi nilai tradisional di tengah perbedaan pandangan generasi muda dan tua, serta mencegah konflik budaya yang dapat melemahkan

¹⁷ Syaifudin Suhri Kasim et al., "MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS KALO SARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 11, no. 1 (April 2022): 106–119.

¹⁸ Zalukhu, "Kalosara Dan Pendidikan Kristen Sebagai Fondasi Kepemimpinan Transformasional Untuk Perdamaian Dan Harmoni Sosial Di Masyarakat Tolaki."

¹⁹ Shinta Arjunita Saputri et al., "Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan," *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 63–76.

persatuan masyarakat.²⁰ Lebih jauh, Kalosara juga mengandung dimensi spiritual yang menekankan keikhlasan, pertobatan, dan komitmen hidup damai. Dengan demikian, Kalosara tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga fondasi moral dan spiritual yang relevan dalam membangun masyarakat multikultural Indonesia yang inklusif, adil, dan harmonis menuju Indonesia Emas 2045.

Teologi Perdamaian dalam Kekristenan

Konsep Dasar Teologi Perdamaian

Teologi perdamaian dalam Kekristenan berakar pada ajaran Yesus Kristus yang menekankan rekonsiliasi, kasih, keadilan, dan harmoni sebagai dasar kehidupan damai. Perdamaian dalam perspektif teologis bukan hanya ketiadaan konflik, melainkan keselarasan relasi antara manusia dengan Allah, sesama, dan ciptaan dalam visi Kerajaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian bersifat spiritual sekaligus sosial, menuntut keterlibatan aktif umat Kristen menghadirkan harmoni di tengah masyarakat plural sebagai agen perdamaian. Dimensi rekonsiliasi ditegaskan dalam 2 Korintus 5:18–19, ketika Paulus menyatakan bahwa Allah mendamaikan manusia dengan diri-Nya melalui Kristus dan mempercayakan pelayanan perdamaian kepada orang percaya. Rekonsiliasi tidak hanya pengalaman spiritual personal, melainkan juga mandat sosial untuk memulihkan relasi antarindividu, komunitas, bahkan struktur sosial melalui tindakan melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan. Kasih sebagai elemen fundamental ditegaskan dalam Matius 22:37–40, di mana Yesus merangkum hukum Taurat dengan kasih kepada Allah dan sesama. Kasih ini bersifat universal, mencakup semua manusia tanpa diskriminasi, sekaligus bersifat radikal karena merangkul kaum marginal dan menentang struktur sosial yang tidak adil. Kasih sejati bukan hanya belas kasihan, tetapi juga keberanian memperjuangkan keadilan, sehingga menjadi prinsip utama dalam menopang teologi perdamaian.

Dalam Perjanjian Lama, Mikha 6:8 menegaskan pentingnya berlaku adil, mencintai kesetiaan (*hesed*), dan hidup rendah hati di hadapan Allah.²¹ Ayat ini memperlihatkan bahwa keadilan sosial merupakan syarat mutlak bagi perdamaian sejati, sementara kesetiaan dan kerendahan hati menjadi fondasi etis relasi yang selaras dengan Allah dan sesama. Perspektif eskatologis dalam Wahyu 7:9 menampilkan visi kosmik tentang keragaman bangsa, suku, dan bahasa yang bersatu di hadapan takhta Allah, menegaskan perdamaian sejati bersifat inklusif, merayakan keragaman, dan menjadi penggenapan rencana Allah bagi seluruh ciptaan. Dari teks-teks Alkitab tersebut, teologi perdamaian dibangun atas empat pilar: rekonsiliasi, kasih, keadilan, dan harmoni, yang mencakup dimensi spiritual, sosial, etis, dan eskatologis.

Implementasi teologi perdamaian menuntut keterlibatan nyata umat Kristen melalui pendidikan perdamaian, advokasi hak asasi manusia, serta pembentukan komunitas yang adil dan inklusif. Gereja memiliki peran penting untuk mengajarkan nilai perdamaian melalui

²⁰ Awal, Andi Aderus, and Indo Santalia, "Moderasi Beragama Pada Masyarakat Konawe Selatan (Studi Atas Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Kalosara Masyarakat Konawe Selatan)," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (October 2023): 195–215.

²¹ Arly E M De Haan, Rolin F S Taneo, and Anika C Takene, "Menafsirkan Mikha 6 : 8 Dalam Konteks Pelayanan Gereja Masehi Injili Di Timor," *Tumou Tou Jurnal Ilmiah* 12, no. 1 (2025): 52–60.

khotbah, bimbingan pastoral, dan aksi sosial yang nyata, sehingga teologi perdamaian tidak berhenti pada ranah konseptual, tetapi menjadi gerakan praksis yang mentransformasi masyarakat. Setiap individu Kristen dipanggil menjadi duta perdamaian dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat luas dengan menghidupi sikap rekonsiliasi, kasih, dan keadilan dalam keseharian mereka. Dalam konteks Indonesia yang plural, teologi perdamaian memiliki relevansi besar untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Nilai-nilai yang diangkat Alkitab—rekonsiliasi, kasih, keadilan, dan harmoni—dapat menjadi dasar dalam menghadapi potensi perpecahan, intoleransi, maupun ketegangan antaridentitas. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan damai, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan menempatkan persatuan di atas perbedaan. Teologi perdamaian pada akhirnya merupakan panggilan iman sekaligus harapan eskatologis bagi umat Kristen, yaitu menghadirkan damai Allah dalam sejarah sebagai cerminan awal dari realitas kosmik yang dijanjikan Allah dalam Kerajaan-Nya.

Peran Gereja dan Komunitas Iman dalam Mempromosikan Perdamaian

Gereja dan komunitas iman memiliki peran sentral dalam membangun serta menjaga perdamaian di tengah masyarakat yang beragam. Sebagai institusi yang berlandaskan ajaran kasih dan keadilan, gereja dipanggil untuk menjadi agen perdamaian yang aktif, tidak hanya dalam ranah spiritual, tetapi juga sosial. Ajaran Kristiani menekankan cinta kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang, sehingga gereja berfungsi bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga ruang pendidikan moral dan pembentukan spiritualitas umat.²² Dalam terang 2 Korintus 5:18–19, gereja dipahami sebagai duta Kristus yang menerima pelayanan perdamaian dari Allah, sehingga perdamaian bukanlah pilihan, melainkan mandat teologis. Kehadiran gereja di masyarakat multikultural dan multireligius menuntutnya untuk membangun jembatan dialog, menumbuhkan toleransi, serta meredakan ketegangan sosial. Dengan demikian, rekonsiliasi yang menjadi inti misi Allah diwujudkan dalam kehidupan nyata, menegaskan bahwa misi gereja bukan hanya mengabarkan Injil, tetapi juga menghadirkan damai Allah dalam dinamika sosial.

Salah satu cara utama gereja mewujudkan perannya adalah melalui pengajaran dan internalisasi nilai-nilai perdamaian. Kasih sebagaimana ditegaskan Yesus dalam Matius 22:37–40, yaitu mengasihi Allah dan sesama, menjadi hukum terutama dan pedoman etis dalam menghadapi perbedaan. Melalui khotbah, sekolah minggu, katekisasi, dan kelompok pemuridan, gereja menanamkan nilai kasih yang universal dan inklusif kepada umat. Kasih yang diajarkan bukan hanya sebatas belas kasihan, melainkan juga keberanian untuk memperjuangkan keadilan sosial dengan merangkul kelompok marginal serta menentang diskriminasi. Internalitas nilai ini membentuk karakter umat yang mampu menghadirkan kasih dalam keluarga, komunitas, maupun ruang publik, sehingga kasih menjadi fondasi perdamaian yang mengikat masyarakat. Lebih jauh, gereja juga berperan sebagai mediator konflik dengan

²² Zein Marshellin Rante, "Peran Gereja Dalam Melakukan Misi Allah Di Tengah Pluralitas Agama Dan Budaya," *Institut Agama Kristen Negeri Toraja*, May 25, 2023, <https://osf.io/pkmt2>.

menyediakan ruang aman untuk dialog, baik di tingkat lokal maupun global. Dengan berlandaskan 2 Korintus 5:18–19, gereja menekankan pengampunan dan rekonsiliasi sebagai jalan membangun hubungan yang rusak. Netralitas gereja memungkinkan perannya sebagai fasilitator, memastikan bahwa penyelesaian konflik didasari pada kasih, keadilan, dan perdamaian sejati.

Selain mediasi, gereja terlibat dalam aksi sosial yang memperjuangkan keadilan sebagai dasar perdamaian berkelanjutan. Mikha 6:8 menegaskan bahwa Allah menuntut manusia berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan-Nya, yang menjadi pedoman gereja dalam menanggapi akar konflik sosial seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan eksploitasi. Melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan kelompok marginal, gereja berupaya memulihkan martabat manusia serta memperbaiki struktur sosial yang timpang. Dengan memperjuangkan keadilan, gereja menegakkan perdamaian bukan hanya pada tingkat personal, melainkan juga struktural. Lebih dari itu, gereja aktif mendorong dialog lintas agama sebagai bentuk komitmen terhadap perdamaian dalam masyarakat plural. Berdasarkan Matius 22:39 tentang kasih kepada sesama, gereja merangkul komunitas agama lain melalui program bersama, diskusi, serta kerja sama sosial. Dialog lintas agama menjadi sarana membangun kesadaran bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman, sekaligus menegaskan bahwa kasih dan penghormatan merupakan prinsip universal yang dapat memperkuat harmoni sosial.

Tidak berhenti di tingkat komunitas, gereja juga berperan dalam ranah kebijakan publik dengan bersuara secara profetis demi menegakkan keadilan sosial.²³ Mandat rekonsiliasi dalam 2 Korintus 5:19 menegaskan bahwa Allah mempercayakan pelayanan perdamaian kepada umat-Nya, sehingga gereja dipanggil untuk menjadi pengawal moral bangsa. Advokasi dalam isu hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan kebijakan publik yang berpihak pada kaum lemah merupakan perwujudan nyata dari misi perdamaian. Gereja hadir sebagai mitra kritis pemerintah, memastikan bahwa sistem sosial mencerminkan prinsip kasih dan keadilan. Peran ini berakar pada visi eskatologis Wahyu 7:9, di mana segala bangsa, suku, dan bahasa bersatu dalam harmoni di hadapan Allah. Visi ini memberikan harapan bahwa perdamaian sejati adalah penggenapan rencana Allah bagi seluruh ciptaan, sekaligus mendorong gereja untuk menjadi saksi dari perdamaian kekal tersebut. Dengan menghidupi misi rekonsiliasi, kasih, keadilan, dan harmoni, gereja dan komunitas iman mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan damai, serta menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia.

Peran Gereja dan Komunitas Iman dalam Mempromosikan Perdamaian, Menghadirkan Keadilan dan Kesejahteraan

Teologi sosial menegaskan bahwa iman Kristen tidak hanya berkaitan dengan dimensi spiritual dan ritual, tetapi juga menyentuh realitas sosial, politik, dan ekonomi.²⁴ Prinsip

²³ Netty Tesa Yolanka, "KEDUDUKAN DAN KETERCAPAIAN DIAKONIA GEREJA DALAM MEMPERJUANGKAN KEADILAN, PERDAMAIAN DAN PEMBAHARUAN SOSIAL," *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 1141.

²⁴ Seprianus L Padakari and Rezeki Putra Gulo, "Teologi Dan Keadilan Sosial : Peran Gereja Dalam Merespons Ketimpangan Global," *Tumou Tou Jurnal Ilmiah* 12 (2025): 42.

dasarnya ialah bahwa Allah peduli terhadap penderitaan manusia, sebagaimana disuarakan para nabi yang mengancam ketidakadilan dan diteladankan Yesus melalui pelayanan kepada kaum miskin serta kelompok yang terpinggirkan. Dari perspektif ini, keadilan dan kesejahteraan tidak bisa dipandang semata sebagai isu kemanusiaan, melainkan bagian integral dari panggilan iman. Gereja dipanggil untuk tidak sekadar menjadi ruang ibadah, melainkan agen profetik dan apostolik transformasi sosial yang menghadirkan kasih Allah melalui karya nyata.²⁵ Teologi sosial dengan demikian menempatkan gereja dalam posisi strategis sebagai motor penggerak terciptanya struktur sosial yang lebih adil dan manusiawi, sekaligus memperlihatkan bahwa tanggung jawab mewujudkan keadilan bukan hanya milik negara atau individu, tetapi juga komunitas iman.

Keadilan dalam kerangka teologi sosial didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), sehingga semua memiliki martabat yang sama. Hal ini menuntut penciptaan sistem sosial yang memungkinkan setiap orang hidup bermartabat, bukan sekadar pemenuhan hak secara formal. Realitas seperti eksploitasi tenaga kerja, marginalisasi minoritas, dan ketimpangan ekonomi merupakan wujud ketidakadilan sistemik yang menuntut respons profetis dari gereja. Gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian yang berani menegur struktur yang menindas, sekaligus mendorong redistribusi sumber daya dan memperjuangkan hak-hak kaum lemah.²⁶ Dalam perspektif ini, keadilan bukan hanya prinsip etis, melainkan manifestasi kasih Allah yang diwujudkan dalam kehidupan sosial. Tugas profetis ini memperlihatkan bahwa gereja tidak boleh bersikap pasif, melainkan aktif mendorong transformasi sosial demi terwujudnya kehidupan bersama yang lebih adil dan setara.

Selain keadilan, dimensi kesejahteraan juga mendapat penekanan penting dalam teologi sosial, karena kesejahteraan tidak sekadar menyangkut aspek ekonomi, melainkan mencakup keseluruhan hidup manusia. Dalam perspektif iman Kristen, kesejahteraan sejati (*shalom*) berarti hidup dalam damai, keharmonisan, dan keseimbangan dengan sesama maupun dengan lingkungan. Gereja karenanya tidak boleh terjebak pada pelayanan rohani yang eksklusif, tetapi harus terlibat aktif dalam pembangunan kesejahteraan yang komprehensif. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta advokasi kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan. Kesejahteraan dipahami bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan material, tetapi sebagai perwujudan kasih Allah yang melingkupi aspek spiritual, psikologis, sosial, dan ekologis. Selain itu, prinsip solidaritas menjadi landasan praksis teologi sosial. Solidaritas sejati, sebagaimana diteladankan Yesus, tidak berhenti pada simpati atau bantuan karitatif, melainkan keterlibatan nyata dalam perjuangan masyarakat tertindas, seperti buruh, petani, minoritas, dan masyarakat adat. Dengan demikian, solidaritas merupakan jembatan iman menuju realitas sosial yang membutuhkan transformasi.

²⁵ James Andersen and Yanto Paulus Hermanto, "KAJIAN TEOLOGIS DAMPAK GERAKAN PROFETIK DAN ASPOTOLIK TERHADAP GEREJA," *Jurnal Gamaliel : Teologi Praktika* 4, no. 1 (March 23, 2022): 29–43, <https://jurnal.stt-gamaliel.ac.id/index.php/gamaliel/article/view/80>.

²⁶ Sri Wahyuni, "Pemimpin Gereja Visioner Pelaku Perubahan," *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 2, no. 1 (June 17, 2021): 184–199, <https://ejurnal.sttkadesiyogyakarta.ac.id/index.php/juteolog/article/view/27>.

Aspek lain yang tak terpisahkan dari teologi sosial ialah rekonsiliasi, yaitu pemulihan relasi yang rusak akibat konflik maupun ketidakadilan. Rekonsiliasi dipahami tidak hanya sebagai pemulihan hubungan antarindividu, tetapi juga antar kelompok sosial yang terpecah karena diskriminasi historis, perbedaan ideologi, atau konflik horizontal. Gereja dipanggil untuk menghadirkan ruang dialog yang memadukan pengampunan dengan penegakan kebenaran, sehingga rekonsiliasi tidak menjadi kompromi semu yang mengabaikan akar masalah. Dalam konteks Indonesia yang sering menghadapi intoleransi dan ketegangan sosial, peran gereja sebagai agen rekonsiliasi sangat penting. Selain itu, teologi sosial juga menekankan pentingnya partisipasi aktif umat dalam ranah publik, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, hingga ekologi, sebagai bentuk nyata iman yang hidup. Dengan keterlibatan aktif, umat Kristen menunjukkan bahwa Injil relevan bagi kehidupan sosial dan publik. Pada akhirnya, teologi sosial memberi wawasan bahwa iman Kristen dapat menjadi kekuatan transformatif untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, adil, dan sejahtera menuju 2045. Gereja, dengan komitmen pada kasih, keadilan, solidaritas, dan rekonsiliasi, dipanggil menjadi saksi sekaligus pelaku nyata transformasi sosial demi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Integrasi Kalosara dan Teologi Perdamaian dalam Menjaga Kesatuan dan Persatuan Menuju Indonesia Emas 2045

Kalosara sebagai simbol adat masyarakat Tolaki tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menyimpan nilai moral mendalam yang berperan dalam menjaga harmoni sosial. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, kesejahteraan, dan persatuan menunjukkan keselarasan dengan prinsip teologi perdamaian dalam Kekristenan yang menekankan kasih, rekonsiliasi, keadilan, dan harmoni. Kesamaan orientasi ini memperlihatkan bahwa Kalosara dan teologi perdamaian memiliki visi yang sama dalam menciptakan kehidupan bersama yang adil, damai, dan inklusif. Musyawarah dalam Kalosara misalnya menekankan penyelesaian konflik melalui dialog partisipatif, sejalan dengan teologi perdamaian yang menekankan rekonsiliasi tanpa kekerasan. Pandangan ini juga relevan dengan penelitian tentang Dalihan Na Tolu sebagai instrumen pendidikan Kristen untuk meredam konflik domestik, yang menekankan penghormatan dalam relasi kekerabatan. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kearifan lokal Tolaki dan tradisi Batak Toba yang sama-sama menjunjung musyawarah sebagai sarana membangun relasi harmonis.

Keadilan dalam Kalosara dipahami sebagai keseimbangan sosial dan penghormatan terhadap martabat individu, yang sejalan dengan pandangan teologi perdamaian bahwa keadilan merupakan prasyarat bagi perdamaian sejati. Tanpa keadilan, perdamaian hanya bersifat semu. Hal ini paralel dengan tradisi Pela Gandong di Maluku, di mana nilai persaudaraan dan kesetiaan digunakan sebagai sarana rekonsiliasi pascakonflik. Baik Kalosara maupun Pela Gandong menunjukkan bahwa keadilan lebih dari sekadar aspek hukum, melainkan komitmen moral menjaga keseimbangan sosial. Selain itu, Kalosara menekankan pentingnya kesejahteraan sosial yang meliputi aspek ekonomi, spiritual, dan psikologis, yang sejalan dengan visi teologi perdamaian tentang shalom, yakni kondisi harmonis dalam relasi manusia dengan sesama dan lingkungan. Penelitian nilai Sipakatau, Sipakalebbe, dan Sipakainge' dalam

masyarakat Bugis-Makassar juga menegaskan bahwa kesejahteraan terwujud melalui penghormatan timbal balik dalam relasi antarindividu.

Menuju Indonesia Emas 2045, integrasi nilai-nilai Kalosara dan teologi perdamaian semakin relevan dalam menghadapi tantangan intoleransi, kesenjangan sosial, dan konflik horizontal. Musyawarah dan rekonsiliasi dapat memperkuat komunikasi lintas budaya, sedangkan keadilan dan kesejahteraan menjadi fondasi pembangunan yang inklusif. Dalam bidang politik, musyawarah memberi teladan bagi praktik demokrasi deliberatif yang menghargai keberagaman. Dalam bidang ekonomi, orientasi pada kesejahteraan sosial mendorong pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Sementara dalam bidang pendidikan, integrasi kearifan lokal dan spiritualitas perdamaian dapat membentuk generasi yang toleran, adil, dan berkeadilan. Dengan demikian, Kalosara dan teologi perdamaian dapat berfungsi sebagai dua sumber etika sosial yang saling melengkapi, sekaligus menjadi landasan kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera pada 2045.

KESIMPULAN

Kalosara sebagai simbol adat masyarakat Tolaki yang menjunjung musyawarah, keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan sosial memiliki keselarasan dengan prinsip teologi perdamaian dalam Kekristenan yang menekankan kasih, rekonsiliasi, dan keadilan sosial. Integrasi nilai kultural-spiritual ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal dan ajaran religius dapat saling menopang sebagai pedoman bersama dalam membangun masyarakat inklusif, damai, dan berkeadilan. Dalam kerangka kebangsaan yang majemuk, penerapan nilai-nilai tersebut berpotensi menjadi strategi efektif untuk memperkuat persatuan, meningkatkan ketahanan sosial, meredam potensi konflik, serta meneguhkan tatanan kehidupan yang harmonis dan toleran demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

REFERENSI

- Alim, Nur, Badarwan Badarwan, and Syahrul Syahrul. "Edukasi Kepemimpinan Berbasis Tradisi Lokal Pada Masyarakat Tolaki Di Kabupaten Konawe." *Shautut Tarbiyah* 26, no. 1 (May 2020): 32–49.
- Andersen, James, and Yanto Paulus Hermanto. "KAJIAN TEOLOGIS DAMPAK GERAKAN PROFETIK DAN ASPOTOLIK TERHADAP GEREJA." *Jurnal Gamaliel : Teologi Praktika* 4, no. 1 (March 23, 2022): 29–43. <https://jurnal.stt-gamaliel.ac.id/index.php/gamaliel/article/view/80>.
- Awal, Andi Aderus, and Indo Santalia. "Moderasi Beragama Pada Masyarakat Konawe Selatan (Studi Atas Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Kalosara Masyarakat Konawe Selatan)." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (October 2023): 195–215.
- Awal, Awal, Andi Aderus, and Indo Santalia. "Moderasi Beragama Pada Masyarakat Konawe Selatan (Studi Atas Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Kalosara Masyarakat Konawe Selatan)." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (October 31, 2023): 195–215. <https://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata/article/view/64>.
- Haan, Arly E M De, Rolin F S Taneo, and Anika C Takene. "Menafsirkan Mikha 6 : 8 Dalam Konteks Pelayanan Gereja Masehi Injili Di Timor." *Tumou Tou Jurnal Ilmiah* 12, no. 1

- (2025): 52–60.
- Hafid, Anwar, Moch Ali Rosdin, Musoffa, and M. Nur Akba. *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL*. Edited by Nur Berlian VA and Voni Damayanti. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Jamil, La Taena, Abdul Alim, and La Aso. “Tradisi Kalo Sara Pada Masyarakat Tolaki Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.” *JPeB (Jurnal Penelitian Budaya)* 8 (2023): 15–26.
- Kasim, Syaifudin Suhri, Sarmadan Sarmadan, Ratna Supiyah, and Damsid Damsid. “MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS KALO SARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA.” *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 11, no. 1 (April 2022): 106–119.
- Munir, I Ketut Suardika & Sulsalman Moita. “Makna Simbolik Kalosara Dalam Kehidupan Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe.” *Jurnal Fokus Penelitian Budaya* 4, no. 1 (2019): 12–22.
- Nur, Rezky Juniarsih, Dadan Wildan, and Siti Komariah. “Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3s (Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge’) Sebagai Simbol Kearifan Lokal.” *Mimesis* 4, no. 2 (2023): 166–179.
- Padakari, Seprianus L, and Rezeki Putra Gulo. “Teologi Dan Keadilan Sosial : Peran Gereja Dalam Merespons Ketimpangan Global.” *Tumou Tou Jurnal Ilmiah* 12 (2025): 41–51.
- Pesurnay, Althien John. “MUATAN NILAI DALAM TRADISI PELA GANDONG DI MALUKU TENGAH.” *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 3, no. 1 (December 3, 2021): 17–28. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JABI/article/view/35003>.
- Putra, Eko, and Syarifuddin Tundreng. “Makna Filosofi Ungkapan Peribahasa Masyarakat Tolaki Mekongga Di Kabupaten Kolaka.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (August 2024): 381–389.
- Ramly, Amisbah, Zulfikar Putra, Slamet Hariyadi, Suriaman Suriaman, and Nur Husnah. “Tradisi Kalosara Dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter Pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 7747–7754.
- Rante, Zein Marshallin. “Peran Gereja Dalam Melakukan Misi Allah Di Tengah Pluralitas Agama Dan Budaya.” *Institut Agama Kristen Negeri Toraja*, May 25, 2023. <https://osf.io/pkmt2>.
- Saputra, Aan Andryan, Djohar Arifin, and Basoddin. “ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN MELALUI HUKUM ADAT TOLAKI (Suatu Studi Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan).” *Sultra Law Review* 02 (2020): 969–986.
- Saputri, Shinta Arjunita, La Ode Dirman, La Ode Ta’alami, and Arie Toursino Hadi. “Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.” *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 63–76.
- Wahyuni, Sri. “Pemimpin Gereja Visioner Pelaku Perubahan.” *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 2, no. 1 (June 17, 2021): 184–199. <https://ejournal.sttkadesiyogyakarta.ac.id/index.php/juteolog/article/view/27>.
- Yolanika, Netty Tesa. “KEDUDUKAN DAN KETERCAPAIAN DIAKONIA GEREJA DALAM MEMPERJUANGKAN KEADILAN, PERDAMAIAN DAN PEMBAHARUAN SOSIAL.” *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 1133–1145.
- Zalukhu, Amirrudin. “Kalosara Dan Pendidikan Kristen Sebagai Fondasi Kepemimpinan Transformasional Untuk Perdamaian Dan Harmoni Sosial Di Masyarakat Tolaki.”

MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen 4, no. 1 (March 2025): 1–19.

———. “Strategi Integratif Teologi Sosial, Perdamaian, Dan Kearifan Lokal Dalam Membangun Harmoni Sosial Di Indonesia.” *CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2025): 175–193. <https://e-journal.anugrah.ac.id/index.php/JCH/article/view/259>.

———. “The Implementation of Dalihan Na Tolu Values as Christian Education in Approaching Domestic Violence Conflict Resolution.” *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 14, no. 2 (June 30, 2025): 295–309. <https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/3005>.